

## **BAB II**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN DAN SUBJEK PENELITIAN**

Pada bab ini dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian analisis framing ditunjuknya Roy Suryo untuk menjabat sebagai Menpora dalam SKH Kedaulatan Rakyat periode 11 Januari sampai 16 Januari 2013. Pertama akan dideskripsikan tentang peristiwa ditunjuknya Roy Suryo untuk menempati posisi sebagai Menpora. Kedua deskripsi mengenai berita ditunjuknya Roy Suryo untuk menjabat sebagai Menpora pada Surat Kabar Harian (SKH) Kedaulatan Rakyat (KR). Terakhir adalah gambaran umum mengenai SKH Kedaulatan Rakyat tersebut.

#### **A. Deskripsi perihal peristiwa ditunjuknya Roy Suryo untuk menjabat sebagai Menpora.**

Pada bulan Januari 2013, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan kebijakan pemerintah Republik Indonesia perihal ditunjuknya Roy Suryo untuk menempati jabatan strategis sebagai Menpora. Penunjukan Roy Suryo mengundang banyak wacana. Masyarakat yang peduli dengan keadaan bangsa angkat bicara. Sebagian mengapresiasi dan memberi dukungan dan sebagian lagi menilai bahwa keputusan tersebut dinilai kurang bijaksana.

Penunjukan Roy Suryo untuk menjabat sebagai Menpora memang beralasan. Pertimbangan untuk mengontrol stabilitas nasional diketengahkan. Nasionalisme menjadi patokan. Sekurang-kurangnya terdapat dua pertimbangan dasariah yang menjadi acuan pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut. Pertama: dunia

persepakbolaan Indonesia sedang dirundung banyak persoalan. Apalagi grafik prestasi dari tahun ke tahun semakin mengalami penurunan. Lebih lanjut, persoalan dalam dunia persepakbolaan tanah air sedang mengalami dualisme kepemimpinan. Tambahan lagi, dunia internasional melalui FIFA kerap mengecam dan bertendensi memberikan sanksi yang tegas atas ketakberesan dunia persepakbolaan tanah air. (<http://www.aktual.co/sanksi-fifa-jatuh-afc-akan-ambil-alih-kasus>. Diakses 20 April 2013) Pemerintah dengan sigap merespon dan segera mengambil langkah solutif dan sebagai langkah antisipatif. Salah satunya ialah dengan menunjuk Roy Suryo menempati posisi Menpora. Roy Suryo diharapkan dapat mengentaskan kemelut yang sedang meliliti dunia persepakbolaan tanah air.

Kedua: kebijakan pemerintah tersebut sangat erat hubungannya dengan persoalan yang sedang dihadapi Andi Malarangeng yang digantikan oleh Roy Suryo. Persoalan tersebut ialah Andi Malarangeng terlibat dalam persoalan hukum Hambalang. Keterlibatan Andi Malarangeng dalam kasus hukum Hambalang menyita banyak perhatian kalangan. Banyak pihak yang menyayangkan realitas tersebut. Kasus yang menimpa Andi Malarangeng tersebut dianggap sebagai sebuah persoalan yang menghambat laju peningkatan prestasi dunia perolahraga tanah air. Lebih lanjut, Andi Malarangeng merupakan salah satu tokoh penting di partai Demokrat. Keterjebakan Andi Malarangeng dalam kasus hukum Hambalang dinilai oleh banyak pihak juga memberikan pengaruh terhadap reputasi partai Demokrat dihadapan masyarakat. Oleh karena itu, kuat dugaan bahwa kebijakan pemerintah tersebut memiliki hubungan yang cukup erat dengan

strategi politik Demokrat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat luas. Meskipun sosok yang menggantikan Andi Malarangeng sebagai Menpora juga berasal dari partai yang sama yaitu Roy Suryo. (<http://uad.ac.id/menanti-menpora-baru>. Diakses 10 Mei 2013). Roy Suryo merupakan politisi asal Yogyakarta yang awal karirnya dirintis di Yogyakarta. Sosok Roy Suryo dikenal sebagai pakar telematika dengan reputasi yang cukup kontroversial. Sejumlah kasus pernah ia tangani, khususnya kasus-kasus yang membutuhkan keahliannya dalam dunia telematika. Sepak terjangnya kemudian dilebarkan dengan menjelajah dunia perpolitikan dan bergabung dengan partai Demokrat. Sampai akhirnya ia terpilih menjadi anggota legislatif. (<http://profil.merdeka.com/indonesia/>. Diakses 16 Februari 2013). Lalu, kini ia mendapatkan tanggung jawab untuk mengemban tugas menjadi Menpora.

Terpilihnya Roy Suryo menjadi Menpora spontan menjadi sorotan banyak media, tidak terkecuali media dari tempat lahirannya. Salah satu media lokal yang paling getol mengurai hal itu ialah SKH Kedaulatan Rakyat. Terpilihnya Roy Suryo menjadi Menpora menyulut banyak reaksi dari masyarakat. Tidak sedikit kalangan rakyat jelata yang menilai kebijakan pemerintah itu keliru, tetapi ada juga yang menyampaikan bahasa dukungan. Banyak pihak yang mempertanyakan keputusan pemerintah Republik Indonesia perihal ditunjuknya Roy Suryo. Mereka menilai sosok Roy Suryo tidak layak untuk memangku jabatan penting itu, argumentasinya jelas yaitu, Roy Suryo dianggap kurang berkompeten dan tidak mampu menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi, khususnya persoalan dalam dunia persepakbolaan tanah air. Diketengahkan pula

pertimbangan tentang *basic* pendidikan Roy Suryo yang dinilai tidak sesuai dengan tugas yang diembankan kepadanya. Sehingga, muncul ketakutan banyak kalangan Roy Suryo tidak akan optimal menangani tugas barunya. (SKH Kedaulatan Rakyat 13 Januari 2013)

**B. Deskripsi berita mengenai peristiwa ditunjuknya Roy Suryo untuk menjabat sebagai Menpora pada SKH Kedaulatan Rakyat**

SKH Kedaulatan Rakyat merupakan Koran lokal yang sangat peduli dengan persoalan yang memiliki kaitan erat dengan daerah istimewa Yogyakarta. (*Company Profile* SKH Kedaulatan Rakyat).

Media massa memiliki sikap tersendiri terhadap berbagai persoalan dan peristiwa yang ada di masyarakat. Sikap media tergambar dalam berita-berita yang dibuat. Begitu pula dengan berita tentang ditunjuknya Roy Suryo untuk menjabat sebagai Menpora. Penempatan berita pada halaman muka di setiap pemberitaan SKH Kedaulatan Rakyat bukan tanpa alasan. Ada berbagai pertimbangan yang menyebabkan SKH Kedaulatan Rakyat menjadikan topik ini *Headline*.

Surat Kabar Harian Kedaultan Rakyat memberikan perhatian yang cukup intens terhadap peristiwa ditunjuknya Roy Suryo untuk menjabat sebagai Menpora. Hal tersebut terindikasi dari pemberitaan SKH Kedaulatan Rakyat yang memberitakannya secara berkesinambungan; mulai tanggal 11 Januari 2013 sampai 16 Januari 2013. Pemberitaan SKH Kedaulatan Rakyat mengenai topik ini pun ditempatkan pada halaman muka atau pertama di setiap pemberitaannya.

Perhatian SKH Kedaulatan Rakyat terhadap topik ini terlihat sangat jelas. Hal itu terlihat pada sejak kemunculan wacana mengenai topik ini muncul dan pada saat pelantikan Roy Suryo serta pada saat Roy Suryo resmi menjabat sebagai Menpora lengkap dengan kebijakan yang ditempuh Roy Suryo.

Berita-berita yang dipublikasikan SKH Kedaulatan Rakyat terkait topik ini antara lain:

1. Edisi tanggal 11 Januari 2013 (halaman muka): Roy Suryo Jadi Menpora.

*Lead:* Teka-teki siapa pengganti Andi Malarangeng sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) mulai menunjukkan titik terang. Kabar yang santer, posisi tersebut akan diisi Roy Suryo, politisi Partai Demokrat asal Yogyakarta. Bahkan ada kabar Roy Suryo dipanggil ke istana

SKH Kedaulatan Rakyat menyuguhkan berita ini ke publik dengan 7 paragraf.

2. Edisi tanggal 12 Januari 2013 (halaman muka): SBY Beri Menpora Tiga Tugas. Roy Suryo Akui Tak Kompeten.

*Lead:* JAKARTA (KR)- Drs Roy Suryo Notodiprodjo MSi menyadari tugas sebagai Menpora bukanlah kompetensinya. Namun dia berjanji akan melaksanakan amanah sebaik-baiknya.

SKH Kedaulatan Rakyat menyajikan berita ini dengan 8 paragraf.

3. Edisi tanggal 13 Januari 2013 (halaman muka): Menpora Belum Pernah Aktif di kepemudaan. Ambar Tjahyono Berpeluang Gantikan Roy Suryo.

*Lead:* JAKARTA (KR)- belum lagi bekerja Menpora baru Roy Suryo sudah langsung mendapat kecaman. Ikatan mahasiswa Muhammadiyah (IMM) bahkan menolak keputusan Presiden SBY mengangkat Roy Suryo sebagai Menpora menggantikan Andi Alfian Malarangeng.

SKH Kedaulatan Rakyat menyajikan berita ini dengan 6 paragraf.

4. Edisi tanggal 15 Januari 2013 (halaman muka): Roy Dilantik Hari ini.

#### Pertimbangkan Bubarkan PSSI

Lead: JAKARTA (KR)- Roy Suryo Notodiprodjo, Selasa (15/1) hari ini akan dilantik oleh Presiden sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Bersamaan dengan itu akan dilantik Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini di Istana Negara.

SKH Kedaulatan Rakyat menyajikan berita ini ke publik dengan 4 paragraf.

5. Edisi tanggal 16 Januari 2013 (*headline*): Kisruh PSSI Jadi Prioritas. Roy Langsung Lari Cepat.

Lead: JAKARTA (KR)- Menpora yang baru KMRT Roy Suryo Notodiprodjo mengaku akan langsung lari cepat karena tugas berat sudah menanti. Bahkan Roy sudah instruksikan kepada para pegawai di Kemenpora agar kurangi upacara seremonial.

SKH Kedaulatan Rakyat menyuguhkan berita ini ke publik dengan 6 paragraf.

#### C. Deskripsi Media

Berdasarkan keputusan Panitia hari bersejarah DIY, diakui bahwa SKH Kedaulatan Rakyat merupakan harian nasional pertama di DIY. SKH Kedaulatan Rakyat lahir pada pasca revolusi kemerdekaan RI, yaitu pada Kamis Kliwon, 27 September 1945, KR memiliki izin yakni SIUPP No.12/SK/MENPEN/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. (*Company profile* SKH Kedaulatan Rakyat)

SKH Kedaulatan Rakyat menurut sejarahnya adalah “Koran revolusi” yang tidak berpihak pada satu golongan, agama atau salah satu partai. SKH Kedaulatan Rakyat lahir sebelum berdirinya partai-partai di Indonesia pada tanggal 3 November 1945. Sehingga, SKH Kedaulatan Rakyat menyatakan bukan milik partai, kekuatan tertentu, organisasi kemasyarakatan atau organisasi politik tertentu. (Chometa. 2009:56)

Setelah 65 tahun berlalu SKH Kedaulatan Rakyat tetap setia bersama rakyat berkarya dan menyebarkan informasi dengan cepat dan tepat sasaran. Sehingga, para jurnalis SKH Kedaulatan Rakyat siap mencari dan mengolah informasi dengan objektif dan berimbang. Berdasarkan motto KR “Amanah Hati Nurani Rakyat”, menunjukkan KR membawa amanat rakyat yang mewakili suara hati nurani rakyat. Selain itu KR juga meningkatkan pengetahuan rakyat dengan menyampaikan informasi kepada rakyat. Kebijakan redaksional di KR adalah independen yaitu tidak memihak pada salah satu pihak. (*Company Profile* SKH Kedaulatan Rakyat)

**Gambaran umum SKH Kedaulatan Rakyat** (*Company Profile* SKH

Kedaulatan Rakyat)

Nama Media : Harian Umum Kedaulatan Rakyat

Jenis : Surat Kabar Harian

Surat izin penerbitan pers: SIUPPNo.127/SK/MENPEM/A7/1986

Tanggal 4 Desember 1990

Haluan : Independen

Motto : *Migunani Tumraping Liyan*, sekecil apa pun kebaikan yang kita perbuat bisa bermakna bagi orang lain.

Berguna bagi semua membuat hidup lebih berarti

Alamat redaksi : Jln. Mangkubumi 40-42 Yogyakarta, 55232

Hari terbit : Senin-Minggu (setiap hari)

Ukuran halaman : 24 halaman

Penerbit : PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta

## Struktur redaksi

Penasihat	: Drs. HM Idham Samawi
Direktur utama	: dr. Gun Nugroho Samawi
Direktur keuangan	: Iman Satriadi, SE
Direktur pemasaran	: Fajar Kusumawardhani, SE
Direktur produksi	: HM Wirmon Samawi, SE MIB
Direktur Litbang	: Sugeng Wibowo, SH
Pemred	: Drs. Octo Lampido, Mpd
Wakil pemred	: Drs. H Ahmad Luthfie Rony Sugiantoro, Spd, SE, MM
Redaktur Pelaksana	: Drs. Hudono, SH Joko Budhiarto
Sekretaris redaksi	: Dr. HJ Suprihatin

## **Visi dan misi SKH Kedaulatan Rakyat** (*Company Profile SKH Kedaulatan Rakyat*)

### 1. Visi

Sebagai sumber informasi bagi masyarakat, Kedaulatan Rakyat ingin menyebarkan informasi dengan cepat dan tepat sasaran. Oleh karena itu, jurnalis Kedaulatan Rakyat siap untuk mencari informasi dan mengolahnya secara berimbang menjadi lembaran-lembaran berita dari surat kabar kebanggaan rakyat seluruh penjuru daerah.

### 2. Misi



Menjadi media yang menyampaikan informasi aktual dan terbaik bagi pembacanya. Untuk mengetahui selera para pembaca, Kedaulatan Rakyat memakai bahasa yang lugas dan gampang dicerna oleh pembacanya. Karena Kedaulatan Rakyat menyadari bahwa pembacanya berasal dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang berbeda pula.

**Profil pembaca Kedaulatan Rakyat** (*Company Profile* SKH Kedaulatan Rakyat)

1. Berdasarkan jenis kelamin didominasi laki-laki dengan prosentase 59,68%, perempuan 40,37%.
2. Berdasarkan jenis pekerjaan, didominasi oleh pelajar atau mahasiswa 28,83%, buruh 21,85%, pekerja kantor 19,14%, pengusaha 16,22%, swasta 9,46%, ibu rumah tangga 4,5%.
3. Menurut tingkat pendidikan dibaca oleh lulusan SMA 51,15%, lulusan universitas 13,96%, lulusan SMP 12,85%, tidak lulus SD 1,5%, lulus S2/S3 1,35%

**Kebijakan redaksional Kedaulatan Rakyat** (*Company profile* SKH Kedaulatan Rakyat)

1. Landasan idiil
  - Suara hati nurani rakyat
  - Berpihak pada NKRI
  - Konsisten menerapkan filosofi “*ngono yo ngono mung ojo ngono*”
  - Independen tidak berpihak pada golongan atau partai politik tertentu
  - Dalam menyikapi keadaan berpegang pada filosofi “*ngeli ning ora keli*”
2. Landasan operasional

- Menekankan solusi dari pada pembuat masalah
- Arif dan bijak serta santun dalam pemberitaan
- Berorientasi pada pemberitaan yang bermanfaat bagi banyak orang
- Menganut keberimbangan dan tetap berpegang teguh pada perundang-undangan pers yang ada dan kode etik wartawan Indonesia
- Kecepatan penelitian berita jangan sampai mengaburkan keakuratan

### **Penghargaan Kedaulatan Rakyat**

1. Cakram *Award* 2006. Sebagai media lokal terbaik 2006
2. Peringkat tujuh jumlah pembaca terbanyak pada kategori all people menurut survey Nielsen Media Research wave tahun 2006
3. Sepuluh besar Koran terbaik 2005 dari dewan pers
4. Peringkat 4 perolehan iklan nasional periode Januari-Desember 2005, menurut Survey Nielsen Research.